

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012 - 2016

Isnurrini Hidayat Susilowati¹, Julia Retnowulan², Wiwik Widiyanti³

¹AMIK BSI Bogor
e-mail: isnurrini.ihs@bsi.ac.id

²ASM BSI Jakarta
e-mail: julia.jlr@bsi.ac.id

³ASM BSI Jakarta
e-mail: wiwik.www@bsi.ac.id

Cara Sitasi: Susilowati, I. H., Retnowulan, J., & Widiyanti, W. (2018). Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012 - 2016. *Widya Cipta*, 2(2), 193–200.

Abstract - One of the form of authorities that has been given by the government in order to fulfill the autonomous region for managing the areas the financial aspect. The purpose of the performance measurement of the goverment is to improve the government's performance itself, allocate the resources that we have, and make some decisions to realize public accountabilities. The form of performance measurements for the goverment is done by conducting a financial analysis of The regional Expenditure Budget (APBD) that has been established and implemented before. The type of research that has been conducted by the researcher is quantitative descriptive. The result of studi indicate financial peformance of the city goverment of Bogor is good. It means that the average amount of PAD Bogor from 2012- 2016 is 26,96 % which is compared with the total regional incomes. The effectiveness of Bogor's regional financial management could happen because it uses an effctive relationship pattern on average above 100%. The ratio of direct expenditure to total expenditure in Bogor from 2012 – 2014 experienced the highest increase, the highest ratio is happened in 2014 54,21%. The PAD growth ratio shows a positive result despite of showing a sharp decline in 2016 of 8,61%.

Keywords: *Autonomy , Financial Performance, Financial analysis*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas terdiri dari 35 propinsi pada saat ini. Dengan luasnya wilayah Indonesia sistem pemerintahan sentralisasi di ubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Pemerintahan daerah mendapat keleluasaan dari pemerintah pusat untuk membangun daerah otonom. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan potensi yang ada.. Otonomi daerah dibuat agar jalannya pemerintahan menjadi lebih efektif.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan oleh pemerintah secara penuh terhadap daerah otonom untuk mengelola daerahnya adalah aspek keuangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka pemerintah daerah

memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Daerah harus menjadi lebih mandiri dan mampu memngurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, APBD dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam menentukan tolok ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran

selanjutnya diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran tersebut dengan cara menetapkan standar suatu daerah sehingga daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien dan akuntabel.

Pelaksanaan otonomi daerah, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian karena pada sisi belanja harus membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran. (Sagay, 2013)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan berbentuk deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

Lokasi Penelitian dilakukan pada pemerintah kota Bogor dengan pengambilan data menggunakan data sekunder yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor, data statistik kota Bogor dalamangka periode 2012 – 2016 yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mencatat atau mengcopy dokumen-dokumen dan data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun tahap-tahap dalam menganalisis laporan keuangan Pemerintah kota Bogor tahun 2012 – 2016 adalah

1. Menghitung derajat kemandirian
2. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah
3. Menghitung rasio efektifitas dan efisiensi daerah
4. Menghitung rasio belanja langsung dan tidak langsung
5. Menghitung rasio pertumbuhan

A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran

untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran. (Kusufi, 2014)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 285 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Pajak daerah
 - 2) Retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah

Menurut UU No 23 tahun 2014 PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD berupa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah.

B. Kinerja

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan. (H.Mutiha, 2016)

Kinerja keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja atau pengelolaan dibidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan dan perundangan-undangan yang diukur Deraselama periode anggaran. Pengukuran kinerja sektor publik atau pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan pelayanan yang baik kepada public. (Mardiasmo, 2013)

Terdapat beberapa analisis rasio di dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan Berdasarkan data data keuangan yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

a. Derajat desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung Berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. (Mahmudi, 2010)

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli daerah dengan dana perimbangan.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat ditampilkan dalam Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD. Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan Berdasarkan potensi riil daerah. Pola hubungan, Tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultatif
Sedang	>50 - 75	Partisipatif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

Sumber : (Kusufi, 2014)

Pola hubungan

Pola hubungan instruktif adalah peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah. Pola konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah telah

dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan pola hubungan partisipatif, peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Bila pemerintah daerah telah benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai pola hubungan delegatif. (Kusufi, 2014)

c. Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2. Efektifitas Keuangan Daerah

Efektifitas Keuangan Daerah Otonom dan kemampuan Keuangan	Rasio efektifitas (%)
Tidak Efektif	X < 100%
Efektif Berimbang	X = 100%
Efektif	X > 100%

Sumber : (Mahsun, 2013)

d. Rasio Efisiensi

Adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}$$

Tabel 3. Efisiensi Keuangan Daerah

Keterangan	Rasio efisiensi (%)
Tidak Efisien	X > 100%
Efisien Berimbang	X = 100%
Efisiensi	X < 100%

Sumber : (Mahsun, 2013)

e. Rasio Belanja Langsung dan belanja Tidak Langsung

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. (Mahmudi, 2010)

Belanja langsung adalah belanja terkait langsung dengan kegiatan (aktifitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Rumus nya sebagai

berikut :

Rasio Biaya langsung =	$\frac{\text{Totak Belanja langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$
Terhadap total belanja	

Rasio Biaya tdk langsung=	$\frac{\text{Total belanja tdkLangsung}}{\text{Total belanja Daerah}}$
terhadapTotal Belanja	

f. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Rasio Pertumbuhan=	$\frac{\text{RelasisaPAD Xn - Xn-1}}{\text{realisasi PAD Xn-1}}$
--------------------	--

Rasio Pertumbuhan pendapaan	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Xn -Xn-1}}{\text{Realisasi Pendapatan Xn-1}}$
--------------------------------	---

Keterangan :

Xn = Tahun yang dihitung

Xn-1 – Tahun sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintahan kota Bogor tahun 2012 – 2016 dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara PAD terhadap total penerimaan PAD. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi .

Tabel 4. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintahan Kota Bogor (dalam Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Hasil Rasio (%)
2012	300,932.47	1,375,300.60	21.88
2013	464,695.88	1,574,372.00	29.52
2014	544,835.70	2,059,879.34	26.45
2015	627,597.05	2,214,415.31	28.34
2016	681,623.90	2,386,362.91	28.56
Rata-rata			26.95

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali

Rata-rata rasio derajat desentralisasi selama 5 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 26.95 % artinya rata-rata besarnya PAD kota Bogor dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar 26.96% dibandingkan total pendapatan daerah



Sumber: Badan Pusat Stastistik, diolah kembali

Gambar 1 Perbandingan PAD dan Total Pendapatan Daerah.

Dari diagram gambar 1 dapat dilihat bahwa jumlah PAD masih relatif kecil dibanding total penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan. Rata-rata rasio antara PAD dan total pendapatan sebesar 26.95% seharusnya bisa ditingkatkan dengan meningkatkan kinerjanya dalam mengelola PAD dengan cara menggali potensi baru atau dengan mengembangkan potensi yang sudah ada misalnya disektor pariwisata dan pendukungnya. Sehingga PAD kota Bogor bisa meningkat melalui sektor pendukungnya juga seperti pajak hotel dan restoran.

Pada penelitian terdahulu di Kabupaten Badung menyatakan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan kontribusi terbesar kepada PAD Kabupaten Badung.Penerimaan pajak hotel dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan.Tahun 2011 Pajak Hotel memberikan sumbangan sebesar 852.955.874 (dalam ribuan rupiah) dan tahun 2015 memberikan sumbangan sebesar1.581.051.410 (dalam ribuan rupiah). Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat memberikan kontribusi terbesar kepada PAD. (Taras, 2017)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bogor (dalam Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Hasil Rasio (%)
2012	300,932.47	741,642.47	40.58
2013	464,695.88	792,975.35	58.60
2014	544,835.70	855,645.88	63.68
2015	627,597.05	814,953.93	77.01
2016	681,623.90	1,247,772.42	54.63

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali

Hasil analisa nya adalah bahwa pola hubungan ,tingkat kemandirian dan kemampuan daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6 : Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah Kota Bogor

Tahun	Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2012	Rendah	40.58	Konsultatif
2013	Sedang	58.60	Partisipatif
2014	Sedang	63.68	Partisipatif
2015	Tinggi	77.01	Delegatif
2016	Sedang	54.63	Partisipatif

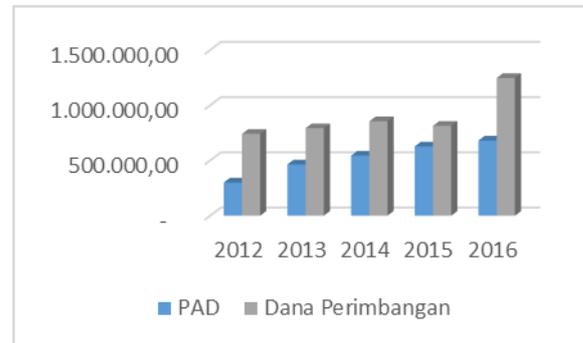
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali.

Pada tahun 2012 pola hubungan konsultatif dan kemampuan keuangan rendah dimana peranan pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Di tahun 2013 dan 2014 peran pemerintah pusat semakin berkurang (tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah). Bahkan di tahun 2015 pola hubungan menjadi delegatif, menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD semakin tinggi. Tetapi di tahun 2016 pola hubungan menjadi menjadi partisipatif kembali dan kemampuan keuangan menjadi katagori sedang dikarenakan meningkat nya secara tajam dana perimbangannya, meningkat 65% dari tahun sebelumnya.

Pada penelitian anggaran tahun 2010 – 2014 kota Bogor menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandiriannya masih mempunyai pola hubungan konsultatif sebesar 31.89 % menunjukkan peranan pemerintah pusat masih lebih dominan. (H.Mutiha, 2016).

Dalam penelitian ini, tahun anggaran 2012 – 2016 pemerintah daerah kota Bogor menunjukkan rata-rata rasio kemandirian sebesar 58.9 % terjadi peningkatan

pola hubungan menjadi partisipatif, peran pemerintah semakin berkurang.



Sumber Badan Pusat Statistik, diolah kembali

Gambar 2. Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan

Penelitian sebelumnya juga dilakukan dikota Tarakan melalui perhitungan rasio kemandirian menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah Kota Tarakan selama periode tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan pola hubungan sampai ke pola hubungan delegatif dimana benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. (Ramadhani, 2016)

3. Rasio Efektifitas Keuangan daerah

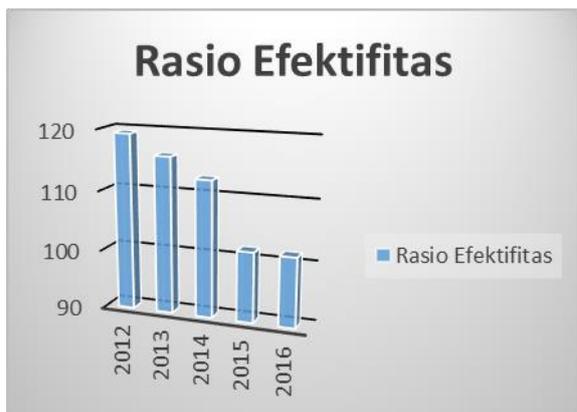
Rasio efektifitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merelisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan Berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi nilai rasio efektifitas, semakin baik kemampuan daerah.

Dalam Penelitian sebelumnya, yaitu kinerja keuangan kota Bogor anggaran tahun 2010- 2014 menunjukkan pola hubungan yang efektif juga namun rasio pertumbuhannya semakin menurun dan mencapai pertumbuhan yang negatif ditahun 2013 hingga tahun 2014. (H.Mutiha, 2016)

Tabel. 7 Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kota Bogor (dalam juta rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Hasil Rasio (%)
2012	300,932.47	252,932.47	119.28
2013	464,695.88	400,676.07	115.98
2014	544,835.70	483,481.02	112.69
2015	627,597.05	617,154.58	101.69
2016	681,623.90	670,999.90	101.58

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali

Gambar 3. Rasio Efektifitas Keuangan Bogor

Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 7 menunjukkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah kota Bogor untuk anggaran tahun 2012 hingga tahun 2016 sudah baik karena masih menunjukkan pola hubungan yang efektif yaitu rata-rata diatas 100%. Namun bila dilihat dari pertumbuhan rasio efektifitas juga semakin menurun.

Pemerintah daerah kota Bogor harus dapat mengoptimalkan penerimaan PAD dengan menganalisa potensi-potensi yang tersedia di daerah kota Bogor dan mengembangkan potensi tersebut untuk meningkatkan pemasukan daerah. Kemampuan dalam menggali potensi sumber penerimaan daerah harus diikuti dengan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya yang dimiliki. Selain itu juga diperlukan kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan.

4. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Total belanja

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktifitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait secara langsung. Belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

Tabel 8. Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kota Bogor (dalam Juta Rupiah)

Tahun	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Hasil Rasio (%)
2012	356,503.10	1,111,776.52	32.07
2013	662,503.10	1,418,539.57	46.70
2014	923,121.85	1,702,962.47	54.21
2015	989,308.00	1,862,982.87	53.10
2016	1,257,914.73	2,342,807.48	53.69

Sumber : Biro Pusat Statistik, diolah kembali

Berdasarkan tabel 8 rasio belanja langsung terhadap

total belanja kota Bogor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan tetapi naik kembali ditahun 2016. Diartikan bahwa kualitas output kegiatan meningkat meskipun ditahun 2015 sedikit mengalami penurunan dari 54.21 % ditahun 2014 menjadi 53.10 %. Pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan menjadi 53.69%

Tabel 9. Rasio Belanja Tidak langsung Terhadap Total Belanja Kota Bogor (dalam Juta Rupiah)

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Hasil Rasio (%)
2012	755,076.77	1,111,776.52	67.92
2013	756,036.47	1,418,539.57	53.30
2014	779,840.62	1,702,962.47	45.79
2015	873,674.87	1,862,982.87	50.00
2016	1,084,992.75	2,342,807.48	50.00

Sumber : Biro Pusat Statistik, diolah kembali

Dilihat dari tabel 8 dan tabel 9 pada tahun 2012 dan tahun 2013 rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja masih lebih besar dibandingkan rasio belanja langsung terhadap total belanja. Namun sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 rasio belanja langsung terhadap total belanja lebih besar daripada total belanja tidak langsung terhadap total belanja.

Kebijakan Pemerintah Bogor sejak tahun 2014 memprioritaskan pada belanja langsung . Hal ini perlu dilakukan karena semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. Rasio aktivitas belanja langsung dan tidak langsung bisa dilihat pada gambar 4.

Dalam penelitian sebelumnya dikatakan bahwa belanja modal sebagai kegiatan investasi pemerintah daerah, yang dapat menambah aktiva tetap yang dimiliki daerah dan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah beberapa tahun kemudian. (Antari, 2018)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali.

Gambar 4. Rasio Aktifitas Kota Bogor Tahun 2012-2016

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. (Sagay, 2013)

Tabel 10. Rasio Pertumbuhan PAD Kota Bogor (dalam juta Rupiah)

Tahun	PAD Xn-1	PAD Xn-1	Hasil rasio (%)
2012	-	-	-
2013	163,763.47	300,932.47	54.42
2014	80,135.70	464,695.88	17.24
2015	80,761.35	544,835.70	14.82
2016	54,026.85	627,597.05	8.61

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali

Pada Tabel 10 rasio Pendapatan Asli daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun mengalami penurunan yang tajam hingga tahun 2016 sebesar 8,61%. Pemerintah daerah kota Bogor harus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola PAD dengan cara menggali potensi baru atau dengan mengembangkan potensi yang sudah ada misalnya disektor pariwisata.

Tabel 11. Tabel Pertumbuhan Pendapatan Kota Bogor (dalam Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Xn-(Xn-1)	Pendapatan Xn-1	Hasil Rasio (%)
2012	-	-	-
2013	684,578.74	1,375,300.60	49.78
2014	485,507.33	2,059,879.34	23.57
2015	154,535.97	2,214,415.31	6.98
2016	171,947.60	2,386,362.91	7.21

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali

Pertumbuhan pendapatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Puncak penurunan tertinggi pada tahun 2015 hanya sebesar 6.98 % dibandingkan tahun 2014. Pertumbuhan pendapatan di tahun 2016 sedikit mengalami kenaikan sebesar 7.21 % dibandingkan pendapatan tahun 2015. Menjadi catatan penting untuk pemerintah daerah kota Bogor agar meningkatkan kinerjanya dalam mendapatkan atau meningkatkan sumber pendapatan dari potensi-potensi yang sudah ada maupun mencari potensi lain untuk bisa meningkatkan pendapatan secara keseluruhan.

Tabel 12. Tabel Pertumbuhan Belanja Kota Bogor (dalam Juta Rupiah)

Tahun	Belanja Xn-1	Belanja Xn-1	Hasil Rasio (%)
2012	-	-	-
2013	591,185.95	1,111,776.52	53.17
2014	281,685.01	1,702,962.47	16.54
2015	44,387.27	1,747,349.74	2.54
2016	422,635.76	2,386,362.91	17.71

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali

Analisis pertumbuhan Belanja Daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar, perubahan cakupan pelayanan dan penyesuaian faktor makroekonomi.

Rasio pertumbuhan Belanja daerah pada tahun 2014 mengalami penurunan tajam menjadi 16.54%. dan tahun 2015 hanya sebesar 2.54% dan tahun 2016 pertumbuhannya mengalami kenaikan menjadi 17.71 %. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah kota Bogor.

KESIMPULAN

Eperbandingan antara PAD terhadap total penerimaan PAD. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi . Rata-rata rasio derajat desentralisasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 26.95% artinya rata-rata besarnya PAD kota Bogor dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar 26.96% dibandingkan total pendapatan daerah.

Tingkat Kemandirian kota Bogor di tahun 2015 pola hubungan menjadi delegatif, menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD semakin tinggi. Efektifitas keuangan daerah Efektifitas pengelolaan keuangan daerah kota Bogor cukup baik karena menunjukkan pola hubungan yang efektif yaitu rata-rata diatas 100%.

Rasio belanja langsung terhadap total belanja kota Bogor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 .mengalami kenaikan. Rasio tertinggi di tahun 2014 yaitu sebesar 54.21 % . Rasio belanja tidak langsung mengalami penurunan dari tahun 2013. Kebijakan Pemerintah Bogor sejak tahun 2014 memprioritaskan pada belanja langsung. Hal ini perlu dilakukan karena semestinya belanja langsung

lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

Rasio Pendapatan Asli daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun mengalami penurunan yang tajam hingga tahun 2016 sebesar 8,61%. Sedangkan Rasio pertumbuhan Belanja daerah pada tahun 2015 hanya sebesar 2.54% dan tahun 2016 pertumbuhannya mengalami kenaikan menjadi 17.71 %.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik.* (2012). Retrieved Agustus 02, 2018, from <http://www.bogorkota.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik.* (2013). Retrieved Agustus 02, 2018, from <http://www.bogorkota.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik.* (2014). Retrieved Agustus 02, 2018, from <http://www.bogorkota.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik.* (2015). Retrieved Agustus 02, 2018, from <http://www.bogorkota.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik.* (2016). Retrieved Agustus 02, 2018, from <http://www.bogorkota.bps.go.id>
- Antari, N. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 7 No 2*, 1104.
- H.Mutiha, A. (2016, Juli - Desember). *Jurnal Vokasi Indonesia Vol 4 No 2*. Retrieved Agustus 27, 2018, from file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/101-170-1-SM.pdf
- Kusufi, H. d. (2014). *Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010 - 2015. *Jurnal*

Ekonomi Pembangunan Vol. 14 No 1 Juni 2016, 92.

- Sagay, B. (2013). Kinerja pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol 1 No 3 September 2013*, 1168.
- Taras, T. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 6 No 5*, 2383.

PROFIL PENULIS

Isnurrini Hidayat Susilowati, SE.MM. lahir di Magelang Jawa Tengah menyelesaikan studi S1 di FE Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan S2 Magister Manajemen di Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor. Pernah bekerja di PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk Bone dan Pare-Pare Sulawesi Selatan sebagai Kepala Operasional dan Administrasi dan di PT. Bank Niaga, Tbk pada Divisi Marketing Komunikasi sebagai Koordinator Marketing Even. Saat ini aktif sebagai dosen pada AMIK BSI Bogor sejak tahun 2010 dan menjadi anggota konsorsium Akademi Manajemen Keuangan (AMK) BSI Jakarta.

Julia Retnowulan, SE.MM. Lahir di Medan 1975. Pada tahun 1994v- 1997 menempuh pendidikan di Politeknik Univesitas Indonesia jurusan Administrasi Niaga program studi Sektretaris, kemudian melanjutkan pendidikan di Jurusan Magister Manajemen Universitas Krisna Dwipayana. Pernah bekerja di perusahaan Trading Company sebagai sekretaris .Dan sejak tahun 2003 aktif sebagai pengajar di Akademi Sekretari dan manajemen BSI Jakarta

Wiwik Widayanti, SE.MM., Dilahirkan di Purworejo, 11 Mei 1977. Pada tahun 1995 -2001 menempuh pendidikan di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan pada tahun 2010-2012 melanjutkan pendidikan di jurusan Magister Manajemen Universitas BSI Bandung. Sejak tahun 2003 aktif sebagai pengajar di Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta..